



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PERUBAHAN RENCANA KERJA

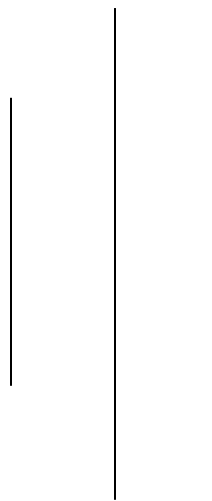
TAHUN

2025

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan program di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada Tahun 2025, sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai sesuai target perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renja merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah. Renja Setda pada Tahun 2025 menggunakan dokumen perencanaan awal Renstra Setda Tahun 2021-2026.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera dan lebih baik.

Kebumen, 26 Juni 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,



Edi Rianto, ST., MT.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197011011998031006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Yunito.P	
Hantari Maltadewi	

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.....	6
A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA Sekretariat Daerah.....	7
B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	15
C. Capaian Keuangan	18
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	22
E. Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	27
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..	47
B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen	49
C. Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	49
D. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	52
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	56
A. Prioritas Sekretariat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten	56
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	57
BAB V. PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	Program dan Kegiatan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	7
Tabel 2.2 :	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	11
Tabel 2.3 :	Pencapaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026	16
Tabel 2.4 :	Rincian Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2024	17
Tabel 2.5 :	Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Triwulan II Tahun 2025	18
Tabel 2.6 :	Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	28
Tabel 3.1 :	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	48
Tabel 3.2 :	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026	50
Tabel 3.3 :	Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	51
Tabel 3.4 :	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	53
Tabel 4.1 :	Program Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	56
Tabel 4.2 :	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004) yang kemudian dijelaskan dengan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang lebih memantapkan kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. Dengan adanya peraturan tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan apabila hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Keluarnya aturan tersebut, juga menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain adalah: Pertama, menyangkut dengan jenis dokumen pembangunan daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokratisasi dalam system pemerintahan daerah. Kedua, sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu dibuat, maka teknis penyusunan rencana juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Ketiga, tahapan penyusunan rencana juga mengalami perubahan untuk menerapkan Sistem Perencanaan Partisipatif guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sebagai usaha yang sistematis, maka pembangunan daerah harus dimulai melalui proses perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan daerah secara lebih tepat dan terarah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Agar dalam implementasinya perencanaan pembangunan pada tingkat level Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada dokumen pendukungnya setiap tahunnya. Dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Memperhatikan hal tersebut, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki arti yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu keniscayaan, tidak terkecuali penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pendapatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyelaraskan prioritas program dan kegiatan

Sekretariat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja meliputi :

1. Sinkronisasi terhadap program-program dalam Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan.
2. Menjabarkan pelaksanaan Rencana Strategis Setda Tahun 2016-2024
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan sebagai tindaklanjut dari permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya sebagai antisipasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan untuk menyamakan persepsi, komitmen dan langkah-langkah kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah, provinsi maupun nasional.
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi perekonomian makro, keuangan daerah, kebutuhan organisasi, aspirasi Masyarakat, serta perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Review Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV.	RENCANA	KERJA	DAN	PENDANAAN	PERANGKAT
	DAERAH				
BAB V.	PENUTUP				

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Kegiatan review hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Sekretariat Daerah Tahun 2025. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada dasarnya mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Didalam review ini secara jelas tergambar terkait realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Tahun 2025 menjalankan 3 Program , 18 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran Murni
SEKRETARIAT DAERAH		51.477.382.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		31.332.406.000
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.225.767.000
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.103.378.000
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.389.100
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.000.000
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.000.000
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.393.620.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.0000
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.124.098.000
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.522.000
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000
5.	Penyediaan Bahan/Material	34.000.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	575.000.000
1.	Pengadaan Mebel	62.000.000
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	453.000.0000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantaor atau Bangunan Lainnya	60.000.000

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran Murni
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.834.999.000
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.603.000
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.569.396.000
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2.369.040.000
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	942.000.000
2.	Pemeliharaan Mebel	124.720.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.720.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.237.600.000
7.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.142.194.000
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	302.394.000
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000
3.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.800.0000
4.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	635.000.000
8.	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	777.500.000
1.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	587.500.000
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	190.000.000

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran Murni
	Kepala Daerah	
9.	Penataan Organisasi	319.000.000
1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000
2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	140.000.000
3.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	79.000.000
10.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	572.286.000
1.	Fasilitasi Keprotokolan	369.984.000
2.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	139.599.000
3.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	62.703.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		18.469.393.000
11	Administrasi Tata Pemerintahan	424.059.000
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	69.440.000
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	68.845.000
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	285.774.000
12.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.534.261.000
1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.135.661.000
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	385.000.000
3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.013.600.000
13.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	458.972.000
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	80.000.000
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	286.057.000
3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	92.915.000
14.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	52.101.000

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran Murni
1.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	52.101.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.675.583.000
15.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	175.480.000
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	121.800.000
2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.600.000
16.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	195.340.000
1.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	55.875.000
2.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	139.465.000
17.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	919.000.000
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	560.000.000
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	63.000.000
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	296.000.000
18.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	385.763.000
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	366.763.000
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.358.000
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	13.551.000,00

Sumber : DPPA Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen 2025

Realisasi dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 (6+7+9+11+)	13 =(12/4)
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM Setda	86	85,42	90,37	85	90,40	104,91	85,5	90,65	105,40
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	60	9	15	12	12	100	12	48	80
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	60	12	18	12	12	100	12	54	90
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	0	0	12	36	60
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik	256	0	21	64	148	231,25	64	233	91,01

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 (6+7+9+11+)	13 =(12/4)
		daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	12	18	12	15	125	12	57	95
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	635	127	189	127	127	100	127	570	89,76
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	12	9	-	12	12	0	12	12	80
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	60	12	18	12	15	125	12	57	95
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen	20	2	2	4	4	100	4	12	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 (6+7+9+11+)	13 =(12/4)
		kegiatan Penataan Organisasi									
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	40	4	4	8	0	0	8	16	40
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,12	2,61	2,61	2,95	3,27	110,85	3,12	3,12	100
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	15	1	5	3	3	533,33	3	12	80
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	75	6	6	15	15	0	15	42	56
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3	3	3	3	3	0	3	3	100
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	25	1	5	5	18	360	5	21	84
4 01 03	PROGRAM	Indeks Kualitas	91	87	97,10	89	97,09	133,82	76,51	76,51	84,07

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 (6+7+9+11+)	13 =(12/4)
	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kebijakan Pembangunan									
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	15	1	1	3	3	100	3	8	53,33
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	2	1	1	2	2	0	2	6	100
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengadaan melalui LPSE	50	10	14	10	10	100	10	44	88
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	20	4	4	4	4	100	4	16	66,66

B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sementara itu Fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
5. Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol
6. Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah
7. Pelaksanaan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lai yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 - 2026

No	Indikator	IKK	Target Renstra Setda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,00	85,00	85,50	86,00	89,57	89,17	85,50	86,00	Tercapai
2.	Tingkat Kemiskinan	%	15,00 – 16,00	14,00- 15,00	13,50 – 14,00	13,00 – 13,50%	16,34	15,71	13,50 – 14,00	13,50 – 14,00	Belum Tercapai
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 – 5,50	5,00 – 5,50	5,00 – 5,50	5,00 – 5,50	5,66	NA	5,00 – 5,50	5,00 – 5,50	Tercapai
4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*	WTP	WTP	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil survei kepuasan Masyarakat yang berupa Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 dengan capaian Sangat Baik, namun demikian masih perlu perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya belum maksimal, rincian unsur pelayanan dalam indeks kepuasan masyarakat setda sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rincian Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat
Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Unsur	Nilai	Kinerja UPP
1	Persyaratan	89,27	Sangat Baik
2	Prosedur	90,04	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	88,19	Baik
4	Biaya/Tarif	91,79	Sangat Baik
5	Produk Layanan	89,52	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	90,26	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	91,20	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	88,78	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	95,21	Sangat Baik
	IKM Setda	89,57	Sangat Baik

C. Capaian Keuangan

Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 17.831.208.568,00 atau sebesar 31,25 % dari total anggaran sebesar Rp. 57.062.471.691,00. Rincian realisasi per jenis belanja tersaji sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Triwulan II Tahun 2025

URAIAN JENIS PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI TRIWULAN II 2025	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.244.480.223	14.380.809.760	36,64
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.225.767.000	9.781.304.711	48,36
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.584.294.000	9.734.925.149	49,71
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111.780.039	46.379.562	41,49
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.000.000	56.553.450	45,98
Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.430.039	9.450.000	46,26
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	47.103.450	47,10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.393.620.000	1.450.867.686	60,61
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	90.000.00	59.694.000	66,33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.822.883.000	613.564.050	33,66
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.769.800	20.744.400	48,50
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	12.000.000	40,00
Penyediaan bahan/material	30.600.000	14.101.000	46,08
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.448.610.000	730.764.236	29,84

URAIAN JENIS PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI TRIWULAN II 2025	%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	575.000.000	102.240.000	17,78
Pengadaan Mebel	2.660.899.000	58.240.000	2,19
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	855.609.000	0	-
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	902.890.000	44.000.000	4,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	2.834.999.000	1.277.389.528	45,06
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	3.742.000	46,78
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	394.478.759	32,87
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.603.000	25.819.850	16,38
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.201.700.000	853.348.919	38,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.388.596.000	803.002.724	33,90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	1.442.000.000	388.853.040	26,97
Pemeliharaan Mebel	124.720.000	107.688.000	86,34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.720.000	33.439.300	37,27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.732.156.000	273.022.384	15,76
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.142.194.000	363.356.951	31,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	302.394.000	99.261.951	32,83

URAIAN JENIS PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI TRIWULAN II 2025	%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	196.731.584	99.095.000	50,37
Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.800.000	0	-
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	835.000.000	165.000.000	19,76
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	777.500.000	253.062.989	32,55
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	703.750.000	162.543.199	23,10
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	264.000.000	90.519.790	34,29
Penataan Organisasi	319.000.000	105.821.014	33,17
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	76.900.800	33.107.574	43,05
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	106.464.500	35.841.770	33,67
Peningkatan Kinerja dan Reformasi	60.925.600	36.871.770	60,52
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	572.286.000	187.210.707	32,71
Fasilitasi Keprotokolan	780.200.000	118.865.093	15,24
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	145.321.300	56.272.750	38,72
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	78.328.500	12.072.864	15,41
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.408.579.344	2.963.619.929	18,06
Administrasi Tata Pemerintahan	424.059.000	180.112.894	42,47
Penataan Administrasi Pemerintahan	57.318.800	27.314.120	47,65
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	51.869.900	25.269.475	48,72

URAIAN JENIS PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI TRIWULAN II 2025	%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	249.399.800	127.529.299	51,13
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.534.261.000	2.649.551.087	15,11
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14.436.257.253	2.242.842.287	15,54
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	325.648.000	154.261.300	47,37
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	915.827.000	252.447.500	27,56
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	458.972.000	105.147.448	22,91
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	51.104.691	12.801.200	25,05
Fasilitasi Bantuan Hukum	222.386.900	59.283.645	26,66
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	61.519.000	33.062.603	53,74
Fasilitasi Kerjasama Daerah	51.101.000	28.808.500	55,29
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	37.248.000	28.808.500	77,34
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.409.412.124	486.778.675	34,54
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	175.480.000	49.647.675	28,29
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	165.930.000	39.090.913	23,56
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	43.505.124	10.556.762	24,27
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	195.340.000	59.790.128	30,61
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	49.287.500	14.976.000	30,38
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	106.330.300	44.814.128	42,15

URAIAN JENIS PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI TRIWULAN II 2025	%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	919.000.000	261.214.453	28,42
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	389.690.000	136.516.687	35,03
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	49.468.000	20.228.730	40,89
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	209.132.000	104.469.036	49,95
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	385.763.000	116.126.623	30,10
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	379.354.000	116.126.623	30,61
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.014.200	0	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air	11.701.000	0	-
JUMLAH TOTAL	57.062.471.691	17.831.208.568	31.25

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Output Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sudah berjalan optimal. Titik tekan pada aspek koordinasi sudah tercermin dalam tugas fungsi dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana terjabarkan dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Kurangnya sosialisasi regulasi kerjasama antar daerah sehingga terjadi ketidakefektifan pelaksanaan kerjasama daerah;
 - c. Perlunya dilakukan susut batas daerah dalam rangka pembenahan batas antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten sekitar;
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Belum semua kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terfasilitasi terutama kegiatan di Luar Kota;
 - b. Kurang lengkap/belum optimalnya bahan-bahan sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan oleh OPD, sehingga berakibat pada belum optimalnya kualitas materi sambutan;
 - c. Kurangnya pengetahuan PNS yang menangani keprotokolan di setiap unit kerja/Desa dan Kelurahan, yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Pimpinan;
 - d. Belum optimalnya sarana, prasarana dan prasarana dokumentasi.
3. Bagian Hukum
 - a. Masih terdapat rancangan Produk Hukum Daerah yang belum sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belum optimalnya analisis kebutuhan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - c. Terdapatnya Produk Hukum Daerah yang sudah tidak harmonis dan sinkron terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. Masih kurangnya pemahaman ASN terhadap tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - e. Masih kurangnya pemahaman ASN terhadap peraturan perundang-undangan;
 - f. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum merata pada semua kecamatan di Kabupaten Kebumen;
 - g. Penghimpunan data laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Perangkat Daerah belum optimal baik dari aspek waktu maupun substansi;
 - h. Pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah belum optimal;
4. Bagian Perekonomian dan SDA
 - a. Belum seluruh BUMD menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang memadai;
 - b. Belum seluruh BUMD telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, mengatur bahwa proses pengadaan Barang/Jasa BUMD tidak berpedoman pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun diatur tersendiri dengan peraturan BUMD;
 - d. Masih kurangnya jumlah SDM pengelola BUMD yang memahami/memiliki skill dan *knowledge* tentang Pengadaan

Barang/Jasa;

- e. Belum seluruh pengurus dan Pengelola BUMD memahami tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - f. Masih terbatasnya ASN di Kabupaten Kebumen yang memiliki sertifikasi kompetensi pengawas BUMD
 - g. Kebutuhan modal BUMD yang dinamis disesuaikan dengan perkembangan usaha dan regulasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - h. Perlunya optimalisasi pemanfaatan pengelolaan dana CSR BUMD guna mendukung pembangunan daerah;
 - i. Perubahan puskesmas di Kabupaten Kebumen sebagai BLUD membutuhkan penyesuaian sistem manajemen manajemen, sistem akuntansi dan keuangan;
 - j. Revolusi industri 4.0 dan legilitas perlu penguatan sistem teknologi dan informasi pada BUMD;
 - k. Masih Perlunya Peningkatan pengawasan terhadap barang bersubsidi seperti LPG 3 KG dan Pupuk.
5. Bagian Administrasi Pembangunan
- a. Belum maksimalnya OPD dalam pengawasan dan Pengendalian Kegiatan yang melibatkan bagian Administrasi Pembangunan dengan sesuai aturan;
 - b. OPD dalam menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan sering kali tidak lengkap;
 - c. Monitoring pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan seluruhnya mengingat terbatasnya personil dibanding dengan banyaknya jumlah paket pekerjaan se-Kabupaten
 - d. Terbatasnya SDM teknis dalam pengawasan dan Pengendalian Kegiatan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- a. Perlunya peningkatan sinergitas komunikasi ulama dan umaro secara intern dan antar umat beragama untuk mengantisipasi potensi konflik;
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang hibah dan bansos;
 - c. Perlunya peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ secara menyeluruh;
 - d. Belum akuratnya data tempat ibadah, lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren;
 - e. Perlunya perhatian terhadap marbot tempat ibadah;
 - f. Masih kurangnya dukungan Sekretariat UKS tingkat kecamatan dalam mendukung pembinaan lomba sekolah sehat;
 - g. Kurangnya pembinaan dan fasilitas terhadap lansia;
 - h. Belum optimalnya pendataan FKK OTA terhadap data anak asuh;
 - i. Belum adanya pembinaan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - j. Kurangnya pembinaan/Fasilitasi terhadap guru PAUD/ra di Kabupaten Kebumen.
7. Bagian Organisasi

- a. Masih perlunya dilakukan analisis penyesuaian terhadap kelembagaan perangkat daerah sehubungan dengan adanya regulasi baik yang baru diterbitkan setelah kelembagaan perangkat daerah terbentuk maupun hasil evaluasi kelembagaan dan penilaian kematangan organisasi daerah;
 - b. Belum ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - c. Belum dilaksanakan Analisis Beban Kerja secara komprehensif terhadap tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sebagai dasar menetapkan jumlah dan kompetensi aparatur yang dibutuhkan pada setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - d. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik;
 - e. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil evaluasi/survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. Belum terpolanya sistem ketatalaksanaan (*business process*), karena belum semua proses penyelenggaraan tugas ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten belum meningkat secara signifikan;
 - h. Masih diperlukannya peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), baik LKjIP Kabupaten maupun LKjIP Perangkat Daerah;
 - i. Belum optimalnya upaya penguatan perangkat kerja yang mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- a. Dokumen permohonan tender dari OPD seringkali belum sesuai dengan persyaratan sehingga menghambat proses pengadaan barang/jasa;
 - b. Belum optimalnya ketersediaan tenaga fungsional pengadaan baik sebagai pokja pemilihan maupun sebagai pejabat pengadaan;
 - c. Kurangnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional pengadaan.
9. Bagian Umum
- a. Belum optimalnya kebersihan di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
 - c. Belum seimbangny dukungan kualitas dan kuantitas SDM dengan tuntutan pelayanan yang dibutuhkan

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat

daerah terdiri dari factor internal dan eksternal Sekretariat Daerah. Faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memiliki kecakapan dan keahlian yang sesuai untuk memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan (terkadang) tumpang tindih tuntutan kinerja dari Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
2. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang terlalu cepat serta tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda- beda.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Dari berbagai permasalahan dari masing-masing Bagian dapat disimpulkan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Koordinasi dan Sinergitas Seluruh Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Mewujudkan *Good Government*;
2. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Reformasi Birokrasi dan Capaian Kinerja Penyelenggara Pemerintahan;
3. Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Sekretariat Daerah Sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
4. Masih perlunya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terkait Pemahaman dan Implementasi Terhadap Tugas dan Fungsi;
5. Belum optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki posisi strategis karena memiliki fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; pelaksanaan tugas SKPD; proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, serta protokol dan komunikasi pimpinan; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur ASN pada instansi daerah; serta pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah

E. Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumberdaya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Adapun review terhadap Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang sudah dientri dalam SIPD RI dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DAERAH				51.477.382.000					57.062.471.691	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai IKM Setda	86,00 Nilai	31.332.406.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai IKM Setda	86,00 Nilai	39.244.480.223	Penyesuaian anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	20.225.767.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	20.225.767.000	Sesuai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan	20.103.378.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan	19.584.294.000	Penyesuaian anggaran
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	122.389.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	111.780.100	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bag. Umum dan Perekonomian dan SDA	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	123.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bag. Umum dan Perekonomian dan SDA	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	123.000.000	Sesuai
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	23.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	20.430.039	Penyesuaian anggaran
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1600 Orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1600 Orang	100.000.000	Sesuai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.393.620.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.393.620.000	Sesuai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	90.000.000	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.242.098.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.822.883.000	Sesuai
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	47.522.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	47.769.800	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	34.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	30.600.000	Penyesuaian anggaran
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	950.000.000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	2.448.610.000	Penyesuaian anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Bag. Umum	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang	64 Unit	575.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Bag. Umum	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang	64 Unit	575.000.000	Sesuai

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah		urusan pemerintah daerah			Pemerintahan Daerah		urusan pemerintah daerah			
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	62.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.660.889.000	Penyesuaian anggaran
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	453.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	888.609.000	Penyesuaian anggaran
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	902.890.000	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	2.834.999.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	2.834.999.000	Sesuai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	Sesuai
	Penyediaan Jasa Komunikasi,		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.200.000.000	Sesuai

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sumber Daya Air dan Listrik		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Sumber Daya Air dan Listrik		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.603.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.603.000	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.569.396.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.201.700.000	Penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	127 Unit	2.369.040.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	127 Unit	2.369.040.000	Sesuai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	109 Unit	942.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	109 Unit	1.442.000.000	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	124.720.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	124.720.000	Sesuai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	64.720.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	89.720.000	Penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh bilitasi	8 Unit	1.237.600.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh bilitasi	8 Unit	1.732.156.000	Penyesuaian anggaran
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH	12 Bulan	1.142.194.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	12 Bulan	1.142.194.000	Sesuai

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan WKDH								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	302.394.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	302.394.000	Sesuai
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	196.731.584	Penyesuaian anggaran
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	4.800.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	4.800.000	Sesuai
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	7 Orang/ Bulan	635.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	7 Orang/ Bulan	835.000.000	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah		dan Wakil Kepala Daerah			Daerah		dan Wakil Kepala Daerah			
	Fasilitasi Kerumahtanggaan	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	777.500.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	777.500.000	Sesuai
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	587.500.000,	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	703.750.000	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	190.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	264.000.000	Penyesuaian anggaran
	Penataan Organisasi	Bag. Organisasi	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	4 Dokumen	323.518.000	Penataan Organisasi	Bag. Organisasi	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	4 Dokumen	319.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengeleolaan Kelembagaan dan	2 Dokumen	100.608.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengeleolaan Kelembagaan dan	2 Dokumen	76.900.800	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Analisis Jabatan					Analisis Jabatan			
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	143.461.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	106.464.500	Penyesuaian anggaran
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	79.449.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	60.925.600	Penyesuaian anggaran
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bag. Prokopim	Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8 Layanan	408.814.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bag. Proko pim	Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8 Layanan	572.286.000	Penyesuaian anggaran
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan	129.616.000	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan	780.200.000	Penyesuaian anggaran
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	139.599.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	145.321.300	Penyesuaian anggaran
	Pendokumentasia n Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	3 Laporan	139.599.000	Pendokumentasia n Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	3 Laporan	78.328.500	Penyesuaian anggaran
2.	Program		Nilai Evaluasi	3,29 nilai	13.305.752.000	Program		Nilai Evaluasi	3,29 nilai	16.408.579.344	Penyesuaian

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			anggaran
	Administrasi Tata Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	3 Kegiatan	390.520.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	3 Kegiatan	424.059.000	Penyesuaian anggaran
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	71.440.000	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	57.318.800	Penyesuaian anggaran
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	68.845.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	57.318.800	Penyesuaian anggaran
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	250.235.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	249.399.800	Penyesuaian anggaran
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15 Kegiatan	12.354.716.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15 Kegiatan	17.534.261.000	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	10.856.116.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	14.436.257.253	Penyesuaian anggaran
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	7 Dokumen	485.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	7 Dokumen	325.648.000	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penduduk dan KB					Penduduk dan KB			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	1.013.600.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	915.827.000	Penyesuaian anggaran
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bag. Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Kegiatan	500.415.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bag. Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Kegiatan	458.972.000	Penyesuaian anggaran
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	51.104.691	Penyesuaian anggaran
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	12 Kasus	310.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	12 Kasus	222.386.900	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Hukum					Hukum			
	Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	626 Dokumen	110.415.000	Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	626 Dokumen	61.519.000	Penyesuaian anggaran
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Bag. Pemerinta han	Jumlah dokumen kerjasama daerah	5 Dokumen	60.101.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Bag. Pemer intaha n	Jumlah dokumen kerjasama daerah	5 Dokumen	52.101.000	Penyesuaian anggaran
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	60.101.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	37.248.000	Penyesuaian anggaran
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan		Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	91,00%	1.732.829.000	Program Perekonomian dan Pembangunan		Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	91,00%	1.409.412.124	Penyesuaian anggaran
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bag. Perekonom ian	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	3 Dokumen	175.480.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bag. Perek onomi an	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	3 Dokumen	175.480.000	Sesuai
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	2 Dokumen	121.880.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	2 Dokumen	165.930.000	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	53.600.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	43.505.124	Penyesuaian anggaran
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bag. Adm. Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	2 Dokumen	246.107.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bag. Adm. Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	2 Dokumen	195.340.000	Penyesuaian anggaran
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	71.755.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	49.287.500	Penyesuaian anggaran
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	174.352.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	106.330.300	Penyesuaian anggaran
	Pengelolaan Pengadaan	Bag. PBJ	Jumlah Laporan Fasilitas	10 Dokumen	929.847.000	Pengelolaan Pengadaan	Bag. PBJ	Jumlah Laporan Fasilitas	10 Dokumen	919.000.000	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Barang dan Jasa		Pengadaan melalui SPSE			Barang dan Jasa		Pengadaan melalui SPSE			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	689.190.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	389.690.000	Penyesuaian anggaran
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	63.677.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	49.468.000	Penyesuaian anggaran
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	176.980.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1000 Orang	209.132.000	Penyesuaian anggaran
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bag. Perekonom ian dan SDA	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	4 Dokumen	381.395.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bag. Perek onomi an dan SDA	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	4 Dokumen	385.763.000	Penyesuaian anggaran
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kalautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	1 Dokumen	336.854.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kalautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kalautan, dan	1 Dokumen	379.354.000	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	5.358.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	5.014.200	Penyesuaian anggaran
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	1 Dokumen	39.183.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	1 Dokumen	11.701.000	Penyesuaian anggaran

No	Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Bertaambah /Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan					Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			

Anggaran Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 51.477.382.000 yang terbagi dalam 1 urusan yaitu unsur pendukung urusan pemerintahan. Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar Rp. 57.062.471.691 terbagi menjadi beberapa Program yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 39.244.480.223; Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 16.408.579.344 dan Program Perekonomian Dan Pembangunan sebesar Rp. 1.409.412.124. Bila dilihat dari program yang dilaksanakan Tahun 2025, Setda memiliki 3 program. Dari proporsi anggaran dari ketiga program tersebut anggaran pada program penunjang urusan pemerintah daerah adalah yang terbesar karena didalamnya terdapat anggaran untuk Gaji ASN. Sedangkan pada program pemerintah dan kesejahteraan rakyat terdapat bantuan Hibah dan Bansos.

Hasil Forum OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut :

1. Forum perangkat daerah sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Evaluasi kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 capaian fisik 98,95% dan keuangan 96,69%. Dimana ada beberapa kegiatan yang belum tercapai diantaranya karena factor eksternal terkait bansos dan hibah pada Bagian Kesra.
3. Capaian kinerja Setda dibawah koordinator Asisten 1 terdapat beberapa yang masih dibawah target seperti tingkat kemiskinan dengan capaian 97,8%, harapan lama sekolah 98,02%, indeks Pembangunan gender 99,9%. Untuk capaian kinerja dibawah koordinator Asisten 2 pada tingkat Pembangunan terbuka telah sesuai target tetapi pada sekor PDRB primer, sekunder dan tersier BPS belum merilis pada saat Forum OPD Setda, serta capaian kinerja dibawah koordinator Asisten 3 yang masih rendah ada di nilai SAKIP yaitu baru 95,8%.
4. Pada perencanaan awal tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan adanya kegiatan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KIE, Taman lingkungan Setda dan Peralatan untuk dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
5. Saran masukan dari narasumber secara garis besar adalah:
 - a. bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan, sesuai kajian harus main strategi teori kemiskinan untuk mengurangi tingkat kemiskinan bukan memperbanyak program, tetapi bagaimana cara menempatkan saran untuk mengurangi jaring-jaring kemiskinan.
 - b. Melihat Kembali kesuaian antara RKPD dengan RPJMD, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD, untuk itu Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Kebumen mengoptimalisasikan sesuai tugas dan fungsinya agar nilai SAKIP segera tercapai sesuai target.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Kebijakan nasional yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai Tahun 2016, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah terkait urusan perencanaan berubah dari kewenangan urusan wajib menjadi urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut tentu berpengaruh terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam urusan perencanaan. Perubahan yang lebih strategis dan penting untuk diperhatikan dan diantisipasi adalah perubahan tugas pokok dan fungsi serta bentuk kelembagaan Sekretariat Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional tertuang dalam Nawa Cita, di antaranya :

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia;
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional;
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor- sektor Strategis Ekonomi Domestik;
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa; dan
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang tersebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 termasuk didalamnya Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi

pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja tersebut merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Selain memperhatikan telaah kebijakan nasional, penyusunan Rencana Kerja juga memperhatikan telaah terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Telaah kebijakan yang dimaksud terkait dengan penyelarasan terhadap arah pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025 yang diarahkan pada upaya pencapaian sasaran tahap IV RPJPD, yaitu pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah berlandaskan keunggulan SDM, pelayanan dasar yang semakin luas, infrastruktur wilayah berkualitas, kondusivitas wilayah yang mantap, serta kemampuan iptek yang meningkat. Selain itu ada arah kebijakan dan strategi yang didalamnya tercakup visi misi Kab. Kebumen.

Tabel. 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Visi	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat	
Misi 1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> terintegrasi	
Tujuan	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik	1. Meningkatkan pembinaan pelayanan publik
		2. Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah
		3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
		4. Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan
		5. Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD
		6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan

		7. Meningkatkan kualitas pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa
--	--	---

B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi Bupati Kebumen adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya, dan bermartabat.

C. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Faktor-faktor yang mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati di Sekretariat Daerah Kebumen adalah :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan
- d. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim
- e. Peningkatan kondsivitas wilayah dan ketahanan bencana

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen bertujuan memberi gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Secara rinci tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah di Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83	84	85	85,5	86	
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83	84	85	85,5	86	

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026

[illegible]

D. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang ada. Program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026. Secara garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen di Tahun 2025 mencakup 3 program dengan 18 kegiatan dan 53 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025

Nomor		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	1	Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Pemerintahan) 1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	2	Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Pemerintahan) 4. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Bagian Hukum) 5. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 6. Fasilitasi Bantuan Hukum 7. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	4	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra) 8. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 9. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 10. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	5	Administrasi Pembangunan (Bagian Adminsitasi Pembangunan) 11. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	6	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Bagian Perekonomian&SDA) 13. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 14. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	7	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Bagian Perekonomian&SDA) 15. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 16. Koordinasii, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 17. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
	8	Pengeloaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian Pengadaan Barang/Jasa)

Nomor		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
		18. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 19. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 20. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
III		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	9	Administrasi Keuangan Perangkat Daeah (Bagian Umum) 21. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	11	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum) 25. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 28. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 29. Penyediaan Bahan/Material 30. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	12	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31. Pengadaan Mebel 32. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 39. Pemeliharaan Mebel 40. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	15	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 42. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Nomor	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
		43. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 44. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 45. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	16	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 46. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 47. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
	17	Penataan Organisasi (Bagian Organisasi) 48. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 49. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Prokopim) 51. Fasilitasi Keprotokolan 52. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 53. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen. Perubahan Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mengampu misi pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi dengan tujuan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk mewujudkan visi misi tersebut maka dituangkan dalam suatu Rencana Kerja. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dan pihak terkait yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Pelaksanaan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Selain berisi program dan kegiatan, Perubahan Rencana Kerja juga berisi pendanaan yang diterjemahkan dalam pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

A. Prioritas Sekretariat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maka Sekretariat Daerah mempunyai beberapa program kegiatan meliputi :

Table 4.1
Program Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Tahun 2025		Tahun 2025 setelah Perubahan		Prakiraan Maju 2026	
			Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai IKM Setda	86,00 Nilai	31.332.406.000	86,00 Nilai	39.244.480.223		19.696.074.100

2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,29 Nilai	16.408.579.344	3,29 Nilai	16.408.579.344		27.865.787.000
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	91,00%	1.409.412.124	91,00%	1.409.412.124		3.381.590.000
	Jumlah			51.477.382.000		57.062.471.691		50.943.451.100

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, serta untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			57.062.471.691
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			57.062.471.691
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Setda	86 Nilai	39.244.480.223
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 bulan	20.225.767.000
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	161 orang/bulan	19.584.294.000
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	111.780.100
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 bulan	123.000.000
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	7 dokumen	20.430.039
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Praturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1600 orang	100.000.000

	4.01.01.2.06	Administrasi Perangkat Umum Daerah		12 bulan	2.393.620.000
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	90.000.000
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	1.822.883.000
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	42.769.800
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	30.000.000
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	4 paket	30.600.000
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara-an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 laporan	2.448.610.000
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		64 unit	575.000.000
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	2.660.889.000
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	888.609.000
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	902.890.000
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	2.834.999.000

	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	8.000.000
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	1.200.000.000
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	157.603.000
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.201.700.000
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		127 unit	2.369.040.000
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	109 unit	1.442.000.000
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	4 unit	124.720.000
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	89.720.000
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 unit	1.732.156.000
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 bulan	1.142.194.000
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan	Jumlah orang yang menerima gaji	2 orang/bulan	302.394.000

		Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah		
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	2 paket	196.731.584
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	8 orang	4.800.000
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	7 orang/bulan	835.000.000
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		12 bulan	777.500.000
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 paket	703.750.000
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 paket	264.000.000
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi		4 dokumen	319.000.000
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	2 dokumen	76.900.800
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1 laporan	106.464.500
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 dokumen	60.925.600
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		8 layanan	572.286.000

	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	3 laporan	780.200.000
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 laporan	145.321.300
	4.01.01.2.14.003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	3 laporan	78.328.500
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,29 Nilai	16.408.579.344
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		3 kegiatan	424.059.000
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	1 dokumen	57.318.800
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	2 dokumen	51.869.900
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	2 dokumen	249.399.800
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		15 kegiatan	17.534.261.000
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	5 dokumen	14.436.257.253
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi	7 dokumen	325.648.000

			kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB		
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas	4 dokumen	915.827.000
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		3 kegiatan	458.972.000
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	550 dokumen	51.104.691
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	12 kasus	222.386.900
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	626 dokumen	61.519.000
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		5 dokumen	52.101.000
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	5 dokumen	37.248.000
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	91,00%	1.409.412.124
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		3 dokumen	175.480.000

	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	165.930.000
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	1 laporan	43.505.124
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		2 dokumen	195.340.000
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12 laporan	49.287.500
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	12 laporan	106.330.300
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		10 dokumen	919.000.000
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2 dokumen	389.690.000
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	1 dokumen	49.468.000
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	1000 orang	209.132.000
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		4 dokumen	385.763.000
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian,	1 dokumen	379.354.000

		Kelautan, dan Perikanan	kehutanan, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja		
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	1 dokumen	5.014.200
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	1 dokumen	11.701.000

BAB V PENUTUP

Perencanaan yang baik dan terukur adalah kunci sukses dan keberhasilan dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan, dalam arti bahwa kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan pencapaian target dan capaian kinerja. Hal ini didukung oleh dokumen perencanaan ini ditaati/dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) melalui komitmen, konsistensi dan pengawalan yang tinggi serta dokumen ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses-proses pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya. Selain itu, sikap, mental, semangat, kejujuran, dan disiplin seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tetap harus dikedepankan.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan tetap memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kebumen dan Renstra Sekretariat Daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan harus melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang salah satunya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Setda Kabupaten Kebumen.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tertuang dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah, baik dalam kerangka regulasi maupun anggaran, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebumen, 26 Juni 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,



Edi Rianto, S.T., M.T
Pembina Utama Muda

NIP. 19701101 199803 1 006

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. MERDEKA NO.2 TELP (0287) 381144, 381410, 381205